

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Pengertian Sistem Akuntansi Instansi**

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah salah satu subsistem dari Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 /PMK.05/2007 Sistem Akuntansi Instansi yang selanjutnya disingkat SAI adalah:

“Serangkaian Prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian Lembaga/Negara.”

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2010:197) Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri atas dua subsitem berikut:

1. Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)

Subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk menyusun neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

2. Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (SA-BAPP)

Subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang merupakan prosedur manual dan terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan,

pengikhtisaran, sampai pada pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan atas transaksi keuangan pusat pada Kementerian/ Lembaga dan Menteri Keuangan sebagai pengguna anggaran.

Dalam melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) kementerian Lembaga/Negara wajib membentuk Unit Akuntansi yang terdiri dari:

1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B)
  - a) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.
  - b) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) adalah satuan kerja/kuasa pengguna barang yang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan Barang Milik Negara (BMN).
2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W).
  - a) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran –Wilayah (UAPPA/B-W) adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh unit akuntansi kuasa pengguna anggaran yang berada dalam wilayah kerjanya.
  - b) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Wilayah adalah unit akuntansi Barang Milik Negara (BMN) pada tingkat wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang –Wilayah (UAPPB-W) dan melakukan kegiatan

penggabungan laporan BMN dari unit akuntansi kuasa pengguna barang, penanggung jawabnya adalah kepala kantor wilayah atau kepala unit kerja yang ditetapkan sebagai UAPPB-W.

3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/ Barang Eselon 1 (UAPPA/B E1).

a) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon 1 (UAPPA-E1) adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh unit akuntansi pembantu pengguna anggaran-wilayah yang berada diwilayah kerjanya serta unit akuntansi kuasa pengguna anggaran yang langsung berada dibawahnya.

b) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Eselon 1 (UAPPB-E1) adalah unit akuntansi Barang Milik Negara (BMN) pada tingkat eselon 1 yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari unit akuntansi pembantu pengguna anggaran-wilayah, dan unit akuntansi kuasa pengguna barang yang langsung berada dibawahnya yang penanggungjawabnya adalah pejabat eselon 1.

4. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B)

a) Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) adalah unit akuntansi instansi pada tingkat kementerian negara/lembaga (Pengguna Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan baik keuangan maupun barang seluruh unit akuntansi pembantu pengguna anggaran-eselon 1 yang berada dibawahnya.

- b) Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) adalah unit akuntansi Barang Milik Negara (BMN) pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari unit akuntansi pembantu pengguna anggaran- eselon 1, yang penanggung jawabnya adalah Menteri/Pimpinan Lembaga.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi instansi adalah Serangkaian Prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dalam rangka menghasilkan informasi untuk menyusun neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

#### **2.1.1.1 Komponen Sistem Akuntansi Instansi**

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah serangkaian prosedur manual dan terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian/lembaga, dengan tahapan (sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007):

1. Proses verifikasi dokumen sumber
2. Input dokumen sumber
3. Verifikasi dan Posting data
4. Pembuatan LRA, Neraca dan CALK

Adapun penjelasan dari komponen sistem akuntansi instansi adalah sebagai berikut :

1. Proses verifikasi dokumen sumber

Verifikasi atau analisis dokumen sumber merupakan proses penentuan kebenaran dan keabsahan dokumen serta penentuan akun dan pengaruhnya terhadap akun yang lain. Dalam menganalisis dokumen/bukti transaksi keuangan dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Dengan adanya analisis kita akan mengetahui kapan terjadinya transaksi, jatuh tempo pembayaran, dan pengaruhnya terhadap akun yang ada pada perusahaan serta keuntungan yang dapat kita peroleh dari transaksi tersebut. Sebelum diproses lebih lanjut untuk dicatat dalam jurnal, bukti-bukti transaksi harus dianalisis kebenaran dan keabsahannya, karena tujuan dari analisis bukti transaksi adalah untuk memeriksa kebenaran dan keabsahan bukti transaksi dan semua informasi yang tercantum didalamnya.

2. Input dokumen sumber

Input Dokumen adalah formulir atau dokumen sumber, yang datanya akan diinputkan ke dalam sistem informasi.

Fungsi dokumen input:

- 1) Sarana untuk mengotorisasi suatu transaksi.
- 2) Sarana untuk memicu tindakan yang diharapkan (missal, memicu konsumen untuk membayar).
- 3) Refleksi akuntabilitas menyediakan data untuk membuat laporan.

### 3. Verifikasi dan Posting data

Verifikasi digunakan untuk menentukan apakah data Saldo Awal Persediaan yang telah direkam sama dengan data yang tertera dalam dokumen sumber. Proses posting data dilakukan untuk memindahkan transaksi yang telah tercatat dan benar ke buku besar. Proses posting ini dilakukan setiap bulan. Jika terdapat perubahan transaksi pada bulan yang telah dilakukan posting, maka transaksi pada bulan tersebut harus dilakukan posting ulang.

### 4. Pembuatan Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/deficit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran sebelumnya, lain-lain dan saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan dan hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi.

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas oprasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/ daerah selama periode tertentu.

Laporan Peubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

CALK memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan

keuangan Negara. Selain itu, CALK memberikan penjelasan atas segala informasi yang ada dalam laporan keuangan lainnya.

### **2.1.2 Rekonsiliasi**

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data atau pencatatan yang terjadi di dua tempat yang berbeda. Beberapa contoh rekonsiliasi sbb :

- Rekonsiliasi Bank adalah proses pencocokan transaksi antara catatan buku bank perusahaan dengan catatan bank dalam Rekening Koran.
- Rekonsiliasi Hutang adalah proses pencocokan transaksi antara catatan hutang perusahaan dengan catatan hutang Supplier.
- Rekonsiliasi Piutang adalah proses pencocokan transaksi antara catatan piutang perusahaan dengan catatan piutang Customer.
- Rekonsiliasi Merchant Credit Card adalah proses pencocokan transaksi antara catatan piutang credit card perusahaan dengan catatan piutang pihak Merchant Credit Card.
- Rekonsiliasi data adalah penetapan pos-pos yang diperlukan untuk mencocokkan saldo masing-masing dari dua akun atau lebih yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya

Dari pengertian diatas lebih mengambil rekonsiliasi data karena melakukan penelitiannya di pemerintah pusat dan dapat disimpulkan bahwa Rekonsiliasi adalah Rekonsiliasi yang terjadi jika sebuah transaksi terdapat lebih dari satu pihak yang mencatat.

Arti rekonsiliasi pada dasarnya adalah salah satu cara referentif yang bisa dijadikan rujukan didalam membenahi problematik kehidupan yang terus

menerus ada. Seperti konflik sosial, konflik agama, kekisruhan antar sesama dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian rekonsiliasi itu sendiri, sering bahkan selalu dipakai dalam upaya mengatasi konflik. Hal ini sebagaimana

Menurut Abdul (2006), mengartikan rekonsiliasi sebagai:

“Suatu tindakan untuk menciptakan proses penyusunan kembali tatanan atau aturan-aturan yang ada didalam masyarakat.”

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga mengartikan Rekonsiliasi sebagai:

“Proses pencocokan · data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/ subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama”

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli dan peraturan menteri keuangan dapat disimpulkan bahwa Rekonsiliasi adalah suatu proses data transaksi keuangan yang diproses melalui sistem/subsistem yang dalam penyusunannya berdasarkan aturan yang ada di masyarakat.

#### **2.1.2.1 Kebijakan Rekonsiliasi**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 104/PMK.05/2017 ada beberapa kebijakan rekonsiliasi antara lain sebagai berikut:

1. Rekonsiliasi antara UAKPA/UAKPA BUN dengan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan

- a. Rekonsiliasi antara UAKPA/UAKPA BUN dengan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dilakukan setiap bulan sebelum laporan keuangan dilakukan rekonsiliasi dengan UAKBUN Daerah.
- b. Hasil rekonsiliasi antara UAKPA/UAKPA BUN dengan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dituangkan dalam BAR.

2. Rekonsiliasi antara UAKPA/UAKPA BUN dengan UAKBUN-Daerah

- a. Seluruh jenjang tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada SAI telah menggunakan single database, demikian pula seluruh tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada SiAP juga telah menggunakan single database. Tetapi karena database SiAP terpisah dengan database SAI, maka untuk menghasilkan data yang akurat dan andal wajib dilakukan rekonsiliasi atas data transaksi keuangan yang diproses oleh kedua sistem tersebut.
- b. UAKPA BUN melaksanakan akuntansi dan pelaporan dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi (SPAN) yang terkoneksi secara single database dengan UAKBUN-Daerah. Dalam hal terdapat UAKPA BUN yang penyusunan laporan keuangannya tidak menggunakan aplikasi SPAN (UAKPA BUN non SPAN) sehingga tidak terkoneksi secara single database dengan Kuasa \_BUN, maka UAKPA BUN tersebut wajib melakukan rekonsiliasi dengan UAKBUN-Daerah.
- c. Rekonsiliasi data laporan keuangan antara UAKPA/ UAKPA BUN non SPAN dengan UAKBUN-Daerah dilaksanakan secara elektronik menggunakan aplikasi rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan

berbasis web (e-Rekon&LK) dan hanya dilakukan di tingkat UAKPA/UAKPA BUN dan UAKBUN-Daerah, dalam hal unit-unit akuntansi pada jenjang di atas UAKPA/UAKPA BUN non SPAN dan UAKBUN-Daerah masing-masing telah terkoneksi secara single database

#### **2.1.2.2 Komponen Rekonsiliasi**

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/ subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 104/PMK.05/2017) dan Rekonsiliasi merupakan proses perbandingan antara subsistem dengan berbeda dengan menggunakan rekonsiliasi internal maupun eksternal yang dapat dilakukan tindak lanjut rekonsiliasi (Aris:2014)

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Rekonsiliasi adalah Rekonsiliasi adalah proses perbandingan pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/ subsistem yang berbeda yang dilakukan secara internal maupun eksternal yang dapat di tindak lanjutkan. Adapun komponen dari rekonsiliasi adalah sebagai berikut :

1. Perbandingan dan pencocokan data transaksi.
2. Rekonsiliasi internal.
3. Rekonsiliasi Eksternal.
4. Tindak Lanjut Hasil Rekonsiliasi.

Adapun penjelasan dari komponen rekonsiliasi adalah sebagai berikut :

1. Perbandingan dan Pencocokan data transaksi.

Rekonsiliasi antara UAKPA/UAKPA BUN dengan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dilaksanakan untuk memastikan kesamaan antara saldo kas di Neraca dengan saldo kas di Bendahara Pengeluaran dan/ atau Bendahara Penerimaan. Rekonsiliasi antara UAKPA/UAKPA BUN dengan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dilaksanakan setiap bulan secara manual antara pembukuan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dengan data laporan keuangan pada UAKPA/UAKPA BUN yang dihasilkan dari Aplikasi SAIBA. Rekonsiliasi antara UAKPA/UAKPA BUN dengan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dilakukan sebelum ADK disampaikan kepada KPPN dalam rangka rekonsiliasi. Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan Saldo Kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Penerimaan pada pembukuan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dengan saldo akun Kas yang tersaji pada Neraca Percobaan UAKPA/UAKPA BUN.

## 2. Rekonsiliasi internal

Rekonsiliasi internal antara UAKPA/UAKPA BUN dengan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dilaksanakan untuk meyakinkan keandalan dan akurasi saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Penerimaan yang disajikan di dalam Neraca. Rekonsiliasi Internal merupakan tahapan penting yang harus dilakukan oleh bagian keuangan (SAKPA) dengan bagian barang (SIMAK BMN) sebelum pelaksanaan rekonsiliasi dengan KPKNL. Rekonsiliasi internal kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Internal yang memuat Rekonsiliasi Saldo Awal, Rekonsiliasi

Transaksi Periode Berjalan, Rekonsiliasi SPM terkait BMN, dan Rekonsiliasi Pendapatan terkait pengelolaan BMN. Tahapan selanjutnya yang akan dibahas pada tutorial ini adalah melakukan rekonsiliasi dengan KPPN.

### 3. Rekonsiliasi Eksternal

Rekonsiliasi Eksternal antara UAKPA dengan KPPN menggunakan Aplikasi E-Rekon untuk Proses rekonsiliasi menjadi lebih mudah (dapat dilakukan oleh satker secara mandiri dari lokasi mana saja, tidak perlu ke KPPN). Terbentuk *single database* yang berisi data seluruh satker di seluruh K/L, sebagai bahan penyusunan laporan keuangan. Adapun proses dalam melakukan rekonsiliasi dengan menggunakan aplikasi E-Rekon Adalah sebagai berikut:

- a) Bagi satker yang telah menggunakan Aplikasi e-rekon dan LK tahun 2016 maka user dan password adalah tetap.
- b) Bagi Satker yang baru menggunakan Aplikasi e-rekon&LK pada tahun 2017, KPPN melayani permintaan user dan password yang diajukan oleh satker sesuai SOP Penerbitan User dan Password e-rekon&LK.
- c) Aplikasi SAIBA minimal versi 4.0 dan refrensi versi 4.0

### 4. Tindak Lanjut Hasil Rekonsiliasi

Rekonsiliasi antara UAKPA dengan KPPN dilaksanakan setiap bulan, minimal 14 hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir. Jika sampai

batas waktu tersebut belum melakukan rekonsiliasi maka akan diterbitkan Surat Peringatan Penyampaian Laporan Keuangan (SP2LK).

Dan jika sampai 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan SP2Lk tersebut satker belum mengirimkan laporan keuangan (rekon) bulanan maka akan diberikan sanksi berupa penundaan penerbitan SP2D atas SPM UP/TUP dan SPM-LS ke Bendahara. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).

### **2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan**

#### **2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan**

Setiap organisasi publik maupun non-publik diharuskan untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ada beberapa fungsi dari laporan keuangan baik laporan secara umum maupun laporan keuangan bagi institusi pemerintahan.

Heri (2012:2) mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan”.

Harahap (2008:105) mendefinisikan laporan keuangan adalah :

“ laporan keuangan adalah media yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomi suatu perusahaan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode, arus dana kas perusahaan pada periode tertentu”.

Menurut PMK RI No. 59/PMK.06/2005 mendefinisikan laporan keuangan dengan:

“Laporan keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan”.

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (2009:2) mendefinisikan

Laporan Keuangan dengan:

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, (yang dapat disajikan dalam beberapa cara misalnya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan atas laporan keuangan lain serta materi penjelasannya yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.”

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 mendefinisikan laporan

keuangan sebagai berikut:

“Laporan Keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.”

Berdasarkan definisi diatas yang diungkapkan para ahli laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menghasilkan informasi akuntansi bagi para pihak yang berkepentingan dan sebagai alat untuk pengambilan keputusan.

### **2.1.3.2 Fungsi Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun dan disajikan memiliki kemampuan *liquiditas*, sehingga dapat digunakan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi guna mencapai tujuan entitas.

Menurut Irawati (2008:145), fungsi laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Untuk memberikan informasi yang berguna, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan atau kondisi *financial* sebuah perusahaan, penilaian terhadap sehat tidaknya suatu perusahaan”.

Fungsi laporan keuangan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, dengan demikian keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat dan tegas untuk dilanjutkan dalam pengambilan keputusan selanjutnya.

### **2.1.3.3 Tujuan Laporan Keuangan**

Standar Akuntansi Keuangan menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) yang diadopsi dari *conceptual framework* IASC. KDPPLK menyatakan bahwa tujuan laporan untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (paragraf 12) dikutip dari Wahyuni (2013:09).

Menurut Mardiasmo (2011:161) tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah:

#### 1. Kepatuhan dan pengelolaan ( *Compliance and Stewardship*)

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otorisasi penguasa bahwa pengelola sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lainnya yang telah ditetapkan.

#### 2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif ( *Accountability and retrospective reporting*)

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi

manajemen, memberikan dasar untuk mengamati *trend* antara kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan bagi mereka untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

### 3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (*Planning and authorization information*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas dimasa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

### 4. Kelangsungan organisasi (*Viability*)

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) dimasa yang akan datang dan bisa bertahan sampai seterusnya dengan menggunakan metode atau teknik yang digunakan.

### 5. Hubungan Masyarakat (*public relation*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi, karyawan, masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan yang berhubungan dengan perusahaan maupun pemerintah.

### 6. Sumber fakta dan gambaran (*source of facts and figures*)

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih mendalam dan sesuai dengan data atau bukti yang ada dan nyata sesuai dengan data dari pemerintah daerah maupun pusat.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah menjelaskan bahwa tujuan umum dari laporan keuangan adalah:

“Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan entitas suatu entitas pelaporan keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.”

Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan pemerintah menurut PP No.71

Tahun 2010 dalam standar akuntansi pemerintahan adalah:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumberdaya ekonomi kewajiban ekuitas dana pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumberdaya ekonomi kewajiban ekuitas dan pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi dan alokasinya penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketataatan terhadap anggarannya.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan menandai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kas.
6. Potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
7. Informasi yang berguna untuk evaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam menandai aktivitasnya.

Laporan keuangan utunk tujuan umumnya juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memperdiksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang

berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait.

#### **2.1.3.4 Komponen Laporan Keuangan**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan bahwa komponen laporan keuangan Kementerian terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Adapun penjelasan dari masing-masing laporan keuangan pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakai sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan pos-pos berikut, yaitu : saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran sebelumnya,

lain-lain dan saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan dan hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi.

### 3. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

### 4. Laporan Operasional

LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

### 5. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

Unsur yang diucapkan dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke bendahara umum negara/daerah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum negara/daerah.

#### 6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

#### 7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Selain itu, catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam Standar Akuntansi Pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

#### **2.1.3.5 Komponen Kualitas Laporan Keuangan**

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan persyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki (PP No. 71 Tahun 2010) :

1. Relevan.
2. Andal.
3. Dapat dibandingkan.

#### 4. Dapat dipahami.

Adapun penjelasan dari masing-masing komponen kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

##### 1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalau atau masa kini, dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalau, dengan demikian, informasi keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut:

##### a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu.

##### b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

##### c) Tepat Waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

##### d) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat

mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dipecah.

## 2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dari kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan tapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

### a) Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan dengan wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

### b) Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

### c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

### 3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang diterapkan sekarang, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

### 4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan Indra Bastian (2010:94): dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Kualitas tertinggi; dapat dipahami dan berguna
2. Kualitas primer; relevan (nilai prediksi, nilai umpan balik, tepat waktu), andal (daya uji, netral, tepat saji).
3. Kualitas sekunder; konsisten, komparatif.
4. Kendala; materialitas, konservatif, biaya manfaat.

Beberapa kualitas penting informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan menurut SAP yaitu dapat dipahami (*understandability*), relevansi (*relevance*), keterandalan (*reliable*) dan dapat diperbandingkan (*comparability*). Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh para pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekuan yang wajar.

Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini menggunakan teori kegunaan informasi (*decision-usefulness theory*). Orang pertama yang menggunakan paradigma kegunaan keputusan (*decision usefulness*) adalah Chambers. Ia mengatakan sebagai berikut:

Oleh karenanya, akibat yang wajar dari asumsi manajemen rasional adalah bahwa seharusnya ada sistem yang menyajikan suatu informasi; seperti sistem yang diperlukan baik untuk dasar pembuatan keputusan atau dasar untuk memperoleh kembali konsekuensi keputusan. Sistem yang menyajikan informasi secara formal akan menyesuaikan dengan dua dalil umum. Pertama adalah kondisi dari setiap wacana ilmiah, system seharusnya secara logika konsisten; tidak ada aturan atau proses yang dapat bertentangan dengan setiap aturan atau proses lainnya. Kedua muncul dari pemakai laporan akuntansi sebagai dasar pembuatan keputusan dari konsekuensi praktik, informasi yang dihasilkan oleh setiap sistem seharusnya relevan dengan berbagai bentuk pembuatan keputusan yang diharapkan dapat digunakan (dalam Belkoui, 2001).

Kegunaan-keputusan informasi akuntansi mengandung komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan oleh para penyaji informasi akuntansi agar

cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya.

Teori kegunaan keputusan (*decision usefulness*) merupakan suatu pendekatan terhadap laporan keuangan yang memiliki pandangan apabila laporan keuangan tidak bisa disiapkan secara teoritis berkonsep wajar, paling tidak penyusunan laporan keuangan historis harus lebih bermanfaat (Scott 2003:52). Penyajian informasi laporan keuangan yang sesuai dengan manfaat atau kebutuhan tertentu akan memperbaiki proses pengambilan keputusan.

Sesuai dengan *decision usefulness theory*, informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus memberikan manfaat baik bagi penyusun maupun pengguna laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan akuntansi berbasis akrual dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif dan lebih baik bagi para pemangku kepentingan dibandingkan dengan basis kas menuju akrual (CTA). Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu pengungkapan paripurna atau *full disclosure* (PPAKP 2014).

### **2.2.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Instansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Selain teori diatas terdapat pula teori yang menyatakan tentang Pengaruh sistem akuntansi instansi dengan kualitas laporan keuangan menurut Mardiasomo (2011:32) adalah sebagai berikut:

“Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan,handal dan dapat dipercaya, pemerintah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga

kurang handal dan relevan untuk pembuatan keputusan. Saat ini sistem akuntansi yang dimiliki pemerintah daerah rata-rata masih lemah”.

Penyelenggaraan SAI sebagai sistem akuntansi sangat diperlukan ketika akan membuat laporan keuangan instansi untuk disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Dengan adanya sistem akuntansi instansi, diharapkan pertanggungjawaban laporan keuangan bisa lebih baik. Definisi kualitas SAI mengacu pada tingkat di mana seseorang pemakai sistem merasa terpuaskan oleh informasi yang dihasilkan oleh suatu sistem informasi formal. Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi yang baik dapat memberikan pemahaman yang baik pula mengenai inti dari lingkup pengelolaan keuangan pada unit-unit kerja di bawah organisasi kementerian/kelembagaan .

Rahman (2012) yang menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Instansi secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas petanggungjawaban laporan keuangan dekonsentrasi pada satuan kerja pemerintah aceh. Selanjutnya, menurut Moni Gusfin Siahaan dan Fachrizamman (2013) Implementasi Sistem Akuntansi Instansi mempunyai arah pengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Hal tersebut didukung oleh Gade (2000:83) yang menjelaskan bahwa pemerintah harus mengembangkan Sistem Akuntansi Pemerintah, Agar pemerintah dapat menyajikan informasi keuangan dengan lebih baik. Selanjutnya Muhammad Gade Menjelaskan dengan sistem akuntansi diharapkan proses pengolahan data transaksi akan lebih cepat, lengkap, akurat, lebih tertib dan lebih terpadu.

Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh sistem akuntansi insatansi terhadap kualitas laporan keuangan.

### **2.2.2 Pengaruh Rekonsiliasi terhadap Kualitas Hasil Laporan Keuangan Instansi Pemerintah**

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK-210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara mendefinisikan rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

“Rekonsiliasi merupakan salah satu proses untuk meyakini bahwa semua transaksi telah dicatat dengan benar oleh kedua belah pihak sebelum disusun laporan keuangan.”

Tambunan (2012) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa rekonsiliasi data, kompetensi SDM, serta sarana dan prasarana pendukung berpengaruh positif terhadap kualitas laporan yang dihasilkan, baik secara parsial maupun secara simultan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa Rekonsiliasi data, kompetensi SDM, serta sarana dan prasarana pendukung secara parsial juga berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Supriyanto (2016) melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Penerapan SAP, Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi, dan Rekonsiliasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan di wilayah pembayaran KPPN Makassar II. Dalam hasil penelitiannya menunjukan bahwa Penerapan SAP, Kompetensi SDM,

Pemanfaatan Teknologi, dan Rekonsiliasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian Wibowo (2013), dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Waktu Penyelesaian Rekonsiliasi Data SAI Satuan Kerja (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Malang). Teknik pengumpulan data yaitu survei dengan kuisiонер dan studi literatur dokumen resmi. Dalam hal ini menunjukkan bahwa rekonsiliasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

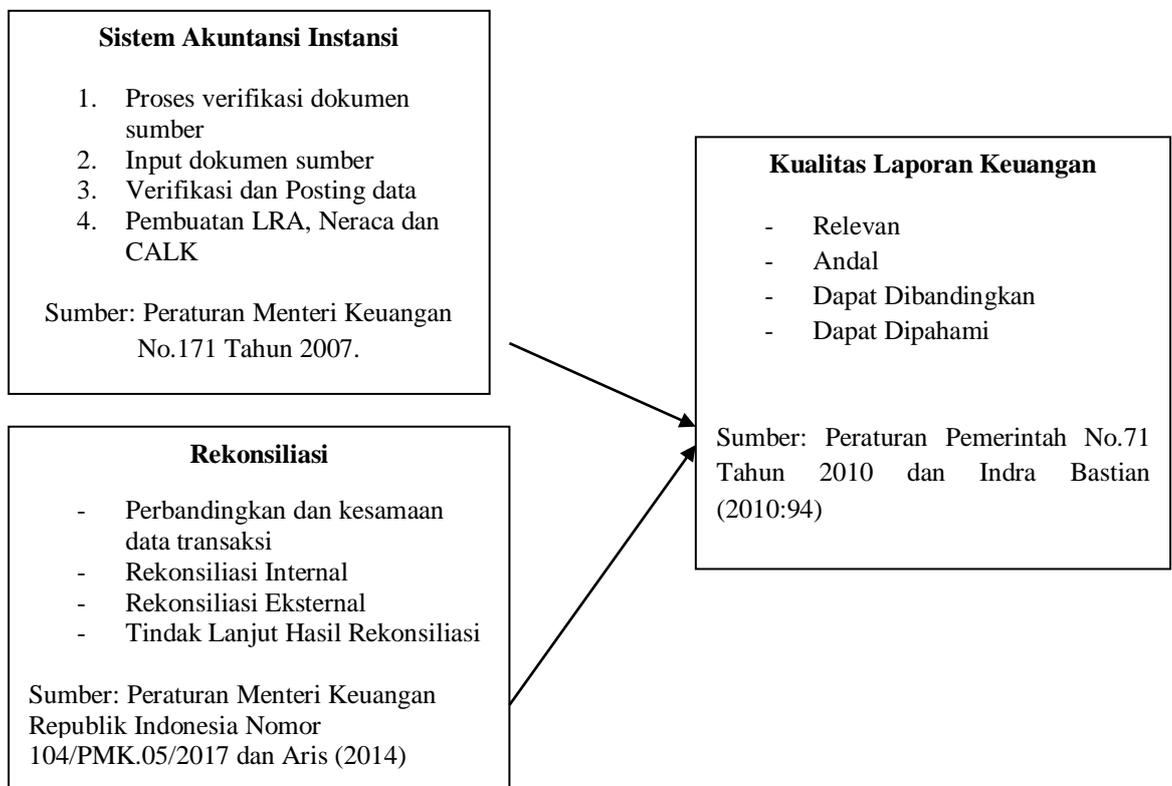
<b>Penelitian</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan</b>
Rahman (2014)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan	- Terdapat penambahan variabel bebas yakni Sistem Akuntansi Instansi - Penulis melakukan penelitian terhadap SPAN Penulis melakukan penelitian di Bandung -
Ardan Abidin (2013)	Pengaruh Ssitem Akuntansi Instansi dan Kompetensi Sumber daya manusia terhadap Kualitas Laporan	Penerapan Sistem Akuntansi Instansi mempunyai pengaruh signifikan positif	Varibel bebas : Sistem Akuntansi Instansi dan Kompetensi

	keuangan.	terhadap kualitas laporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo.	Sumber Daya Manusia Variabel terikat : Kualitas laporan keuangan
Tambunan (2012)	Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kualitas laporan keuangan pada satuan kerja di lingkungan badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.	Terdapat pengaruh positif antara Rekonsiliasi Pengelolaan Terhadap Kualitas Keuangan.	Variabel bebas : Rekonsiliasi data, Kompetensi SDM, serta sarana dan prasarana pendukung Variabel terikat : Kualitas Laporan Keuangan
Supriyanto (2014)	Pengaruh Penerapan SAP, Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi, dan Rekonsiliasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan di wilayah pembayaran KPPN Makassar II	Penerapan SAP, Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi, dan Rekonsiliasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan	- Terdapat penambahan variabel bebas yakni Kompetensi sumber daya manusia, Pemanfaatan Teknologi, Rekonsiliasi - Penulis melakukan penelitian terhadap SPAN
Wibowo	Analisis Faktor-Faktor	Rekonsiliasi data	- Terdapat

(2013)	Yang Mempengaruhi Waktu Penyelesaian Rekonsiliasi Data Satuan Kerja (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Malang)	berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan	variabel bebas yakni Rekonsiliasi asli - Variabel terikat : Kualitas laporan keuangan
--------	--	---	--

Berdasarkan kerangka penelitian dan juga didasari oleh penelitian terdahulu, penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh sistem akuntansi instansi dan Rekonsiliasi terhadap kualitas laporan keuangan.

Dari kerangka pemikiran diatas maka dapat digambarkan alur hubungan antar variabel yang diteliti dalam paradigma sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Paradigma Penelitian**

### **2.3 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya maka dalam penelitian ini, rumusan hipotesis penelitian yang diajukan penulis adalah sebagai berikut:

H1 = Sistem Akuntansi Instansi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

H2 = Rekonsiliasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

.